

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya, Zaka Firma. *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi (Dalam Teori dan Praktik)*. Cetakan Kesatu. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Ketiga. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2006.
- _____. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Konstitusi Pers. Jakarta. 2006.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Kesembilan. Rajawali Pers. Depok. 2017.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refromasi*, Cetakan Kedua. Bhuana Ilmu Populer. 2008.
- Busro, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketiga Belas. Bumi Aksara. Jakarta. 2017.
- Hufron. *Pemberhentian Presiden di Indonesia (Antara Teori Dan Praktik)*. Cetakan Kedua. LaksBANG PRESSindo. Yogyakarta. 2018.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*. Cetakan Kedua. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- _____. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Cetakan Keempat. Rajawali Pers. Depok. 2018
- _____. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial)*. Cetakan Kedua. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- Kusnardi, Moh, Hermaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kedua Belas. Sastra Hudaya. Jakarta. 2010.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum (Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan)*. Cetatan Ketiga. Edisi Kedua. Yrama Widya. Bandung. 2019.

- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers. Depok. 2018.
- MD, Moch Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Rajawali Pers. Depok. 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- _____. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Kedua. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Yudisial (Sumber Pembangunan Hukum Nasional)*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Pengujian Undang-Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik)*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan dalam Praktik)*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers. Depok. 2019.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Cetakan Keduabelas. Rajawali Pers. Depok. 2015.
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

B. Jurnal

- Akbar, Muhamad Ahsan. "Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi". *Jurnal SASI*. Vol 26. No 3. 2020
- Benyal, Hariyanto Sofyan. "*Transformasi Kewenangan DPD Dalam Ius Constitutum Ke Arah Ius Constituendum Demi Kesetaraan Dalam Bikameral*". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol 3. No. 1. 2020.
- Bustami, Daschran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 46 No 4. 2017.
- Ismail, M. "Pasang Surut Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Unmas Mataram*. Vol 12. No 2. 2018

Isnaeni , Belly. “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”. Jurnal Magister Hukum FH Universitas Pamulang. Vol VI. No 2. 2021

Kristiyanto, Eko Noer. “Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. Jurnal RECHTVINDING. Vol 2. No 3. 2013.

Lestari, Amanda Dea, Bustanuddin. “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi : Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtvinding) Yang Progresif”. Limbago Journal Of Constitutional Law. Vol 1. No 1. 2021.

Marzuki, M Laica. “*Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”. Jurnal Konstitusi. Vol 7 No 1. 2010.

Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)” . Jurnal Legislasi. Vol IV No 1. 2013.

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”. Jurnal Konstitusi. Vol 10 No 2. 2013.

Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Tujuan Negara”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke 37 No 2. 2007.

Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 14 No 3. 2014.

Siregar, Lisdhani Hamdan. “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*”. Jurnal Konstitusi. Vol 9 No 2. 2012.

Wahid, Abdul. “Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ”. Jurnal Konstitusi. Vol 11. No 4. 2014.

Widodo, Hananto, Dicky Prasetyo, Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan Antara Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Pandecta. Vol 15 No 1. 2020.

Yudhistira, Elsan. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya *Abuse Of Power*”. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 23 No 2. 2020.

C. Surat Kabar

Saputra, Eka Yudha. “Muhyiddi Yassin Akan Mundur, Politik Malaysia Dalam Ketidakpastian” *Tempo.co*, Berita, 15 Agustus 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.*

_____. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.* LNRI Tahun 2003 Nomor 98. TLNRI Nomor 4316.

_____, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* LNRI Tahun 181. TLNRI Nomor 6396.

Mahkamah Konstitusi, *Peraturan No 21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.*